

**MEMPERKUAT DAYA SAING BISNIS DAN EKONOMI
DALAM MENGHADAPI
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015**

**Oleh
Lufthia Sevriana
Dosen Tetap Program Studi Manajemen Unisba
E-mail: lufthia.sevriana@gmail.com**

ABSTRAK

MEA (masyarakat ekonomi asean) memiliki lima pilar utama, yakni Mobilitas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Indonesia sebagai pemilik jumlah penduduk tertinggi di ASEAN sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA dengan menganalisis peluang MEA dari segi lima pilar tersebut dan mengevaluasi kondisi terkini di dalam negeri agar dapat diketahui aspek mana saja yang perlu diperbaiki dan aspek mana saja yang potensial untuk lebih dikembangkan. Peningkatan volume ekspor dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pilar mobilisasi barang Indonesia. Perbaikan kualitas pendidikan adalah salah satu upaya jangka panjang untuk menghasilkan sumber daya terampil yang lebih berkualitas. Hambatan dalam peningkatan kualitas jasa dapat dikurangi dengan mempermudah sarana dalam bisnis yang bergerak di bidang jasa seperti memperbaiki infrastruktur di dalam negeri. Pemerintah juga dapat memperbaiki pilar investasi dengan cara merevisi kemudahan pihak asing dalam menjalankan usaha di Indonesia, seperti yang sudah lama dijalankan oleh Singapura. Sementara untuk pilar mobilisasi arus modal, Indonesia sedang mengusahakan integrasi pada sektor keuangan agar dapat meminimalisir efek negatif dari dasarnya arus modal yang biasa terjadi pada penerapan pasar bebas.

Kata Kunci: ASEAN, MEA, lima pilar

I. PENDAHULUAN

Kebebasan mobilitas tenaga kerja terampil sebagai salah satu konsep dari MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), adalah poin yang paling menjanjikan bagi Indonesia yang memiliki populasi yang besar dengan dibukanya pasar bebas ASEAN ini. MEA atau dalam Bahasa Inggris disingkat dengan AEC (*ASEAN Economic Community*), akan diimplementasikan pada akhir tahun 2015 ini. MEA dideklarasikan Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 di Singapura 20 November 2007.

Konsep MEA sebagai penyatuan seluruh negara anggota ASEAN, adalah pergerakan bebas dari barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Sebelumnya, pada Oktober tahun 2003 dalam *Bali Concord II*, MEA ditetapkan sebagai tujuan integrasi ekonomi regional dalam kerangka besar Visi ASEAN 2020. Selain MEA, terdapat *ASEAN Security Community* dan *The ASEAN Socio-Cultural Community* sebagai dua pilar dalam bangunan MEA yang ketiganya diharapkan berfungsi penuh pada 2020.

Berdasarkan Kajian Khusus mengenai MEA pada Tabloid Kontan No. 15-XIX Edisi 5-11 Januari 2015, Ada empat pilar tujuan implementasi MEA. *Pertama*, membentuk pasar tunggal dan basis produksi regional. *Kedua*, membangun kawasan berdaya saing tinggi. *Ketiga*, membentuk kawasan dengan pembangunan ekonomi merata. *Keempat*, menjadikan ASEAN sebagai kawasan terintegrasi dengan ekonomi dunia.

Negara-negara pendiri ASEAN (ASEAN-5) yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand memiliki pencapaian tersendiri atas kesiapan menghadapi MEA. Singapura adalah negara yang paling siap menghadapi MEA dari segi keterbukaan ekonomi dan kesiapan daya saing. Bank Indonesia (BI) juga mengakui, Singapura negara yang paling siap menyambut MEA karena menguasai 44,9% ekspor antar negara atau *intra-trade ASEAN*.

Penilaian tersebut disebabkan Singapura memiliki rasio perdagangan luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) paling tinggi di dunia, sekitar 400% rata-rata selama 2008-2011. Ini mencerminkan posisinya sebagai pusat hub atau *transshipment* utama ASEAN. Posisi ini akan semakin kuat pasca berlakunya MEA.

Tabel. 1.1. Intra-Trade ASEAN per Negara
(%)

DARI KE	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	Total
Indonesia	-	4,2	1,5	6,4	2,0	14,1
Malaysia	3,1	-	1,2	13,7	5,3	23,2
Filipina	0,2	0,8	-	1,5	0,8	3,4
Singapura	16,3	19,3	3,1	-	6,3	44,9
Thailand	2,9	4,8	1,9	4,7	-	14,3
Total	22,5	29,1	7,8	26,3	14,3	100

Sumber: ASEAN Secretariat dalam Tabloid Kontan No. 15-XIX Edisi 5-11 Januari 2015

Malaysia memiliki daya saing dengan fokus pada sektor wisata kesehatan. Thailand sudah bersiap menghadapi MEA dengan mendirikan banyak pusat kajian bahasa dan budaya negara anggota ASEAN, sosialisasi konsep dan strategi menghadapi MEA dari tingkat desa sampai nasional. Bagi Indonesia, terdapat banyak tantangan dalam menghadapi MEA yang menjanjikan mobilitas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Makalah ini membahas upaya penguatan daya saing bisnis dan ekonomi dalam menghadapi MEA 2015 dengan menjelaskan tantangan dan upaya yang dilakukan untuk menjawab kesempatan yang dijanjikan MEA dalam hal mobilitas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal.

II. PELUANG BAGI MOBILITAS BARANG, JASA, INVESTASI, TENAGA KERJA TERAMPIL, DAN MODAL

2.1 Peluang bagi Mobilitas Barang

Integrasi, menjadi kata utama dalam memahami konsep MEA. Untuk menghadapi proses integrasi, Pelaku bisnis Indonesia, Infrastruktur, dan suprastruktur baik legal maupun ekonomi, harus siap menghadapi MEA. Penerapan MEA akan menjadikan persaingan di berbagai sektor industri di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Pelaku bisnis di Indonesia yang kebanyakan adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), memiliki kelebihan dibandingkan Pelaku Bisnis asing dalam hal pemahaman kultur Konsumen Indonesia. Pelaku bisnis lokal, akan lebih memahami kultur dari konsumen sehingga dapat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kultur konsumen di Indonesia. Kendala yang masih sulit diatasi pengusaha UMKM adalah mengatasi persaingan dengan produk impor.

Peluang bagi Indonesia juga terdapat dalam kegiatan Ekspor kepada negara anggota ASEAN. Banyak produk Indonesia yang memiliki daya saing tinggi, oleh karena itu Indonesia harus melakukan upaya yang terbaik agar terjadi peningkatan ekspor produk-produk dengan daya saing tinggi tersebut. Untuk itu, kendala yang menghambat upaya peningkatan ekspor harus segera ditangani. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor negara kita sepanjang Januari hingga Oktober 2014 lalu turun 1,06% ketimbang periode yang sama di 2013 lalu menjadi US\$ 148,06 miliar. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober juga mengalami defisit sebesar US\$ 1,64 miliar.

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diprediksikan masih belum tinggi. Tapi, pemerintah optimistis bahwa nilai ekspor Indonesia 2015 nanti bisa mencapai US\$ 192 miliar atau naik 4,17% dari target pada 2014 yang hanya US\$ 184,3 miliar. Meskipun Rupiah terus mengalami penurunan nilai, pemerintah

berasumsi bahwa ini adalah kesempatan untuk memperkuat fondasi untuk meningkatkan ekspor. Pemerintah mencanangkan peningkatan ekspor tahun ini sebesar 300%.

Pelaku bisnis merespon target tersebut dengan menyampaikan masalah-masalah yang menghambat peningkatan ekspor. Masalah-masalah yang menghambat peningkatan ekspor adalah masalah yang terkait dengan masalah insentif yang sedang dibahas. Kementerian Perdagangan harus melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mendapat solusi yang terbaik. Insentif setiap industri berbeda-beda. Sejauh ini Pemerintah bisa memberikan kredit penjaminan ekspor dengan bunga di bawah bunga komersial. Lalu ada asuransi ekspor dan kemudahan-kemudahan dalam berproduksi di Indonesia.

Salah satu kendala yang menghambat upaya peningkatan daya saing produk dalam negeri adalah kelonggaran dalam aturan dan proteksi mobilitas barang impor. Harga yang murah dari produk impor tersebut, cenderung membuat konsumen mengesampingkan mutu baik yang dapat mereka peroleh dari produk lokal. Banyak juga terjadi kasus dimana produk impor yang dibeli tidak mencantumkan standar SNI dan tidak menggunakan Bahasa Indonesia pada manual penggunaannya.

2.2. Peluang bagi Jasa

Liberalisasi pasar jasa saat MEA 2015 dilaksanakan pada dasarnya akan sangat menguntungkan bagi Indonesia karena akan terjadi efisiensi sektor jasa dalam artian adanya peningkatan kualitas jasa itu sendiri dan penentuan biaya kewajaran bagi tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan iklim yang kompetitif dalam industri jasa sehingga investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di sektor ini. Efisiensi dalam sektor jasa akan sangat membantu dalam meningkatkan kompetisi, produktivitas, dan pengembangan sektor jasa yang baru.

Pemerintah pun membantu perencanaan guna menghadapi MEA 2015 ini, salah satunya melalui instrumen kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan dimana dalam salah satu pasal yaitu pasal 21 disebutkan bahwa pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional. Pasal ini menjadi pasal yang strategis bagi pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan karena pasal ini memberikan dukungan dan perlindungan bagi Pemerintah dan pihak-pihak yang berkecimpungan di sektor jasa dalam perundingan kerjasama dengan negara dalam sektor jasa, sehingga diharapkan sektor jasa dalam negeri bisa diserap juga oleh negara ASEAN, bukan kita saja yang menggunakan jasa dari negara lain.

Di lain sisi, ASEAN pun pada tahun 1995 sudah mengadopsi AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*) yang pada dasarnya adalah menghilangkan hambatan dalam sektor perdagangan jasa antar negara anggota, perdagangan jasa yang dimaksud dalam AFAS adalah transportasi laut dan udara, jasa bisnis, konstruksi, telekomunikasi, pariwisata, finansial, kesehatan, dan logistik.

2.3. Peluang bagi Investasi

Saat MEA 2015 berlangsung, para investor asing akan lebih mudah untuk berinvestasi di negara-negara ASEAN sehingga akan menstimulus pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Bagi Indonesia, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan, karena dilapangan ada beberapa hal yang justru akan menghambat masuknya investor asing saat MEA 2015.

Infrastruktur transportasi dan energi di Indonesia menjadi salah satu masalah yang justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, I Wayan Dipta mengakui bahwa infrastruktur di Indonesia khususnya transportasi dan energi masih lemah sehingga

menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi (dikutip dari www.swa.co.id), kondisi yang justru dihindari oleh investor. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk memperbaiki sektor yang bisa dikatakan vital ini, pemerintah sendiri saat ini tengah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelabuhan dan bandar udara berstandar internasional, selain itu melalui PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) meningkatkan promosi investasi di bidang infrastruktur (Liputan 6.com).

Masalah kesiapan para pelaku bisnis khususnya UMKM menjadi salah satu isu yang patut menjadi perhatian pemerintah. Karena masih banyak diantara pelaku bisnis yang belum siap untuk berkompetisi dalam segi harga, kualitas, dan mental sehingga justru dengan akan datangnya MEA 2015 ini malah menjadi ancaman bagi beberapa pelaku bisnis. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan kualitas SDM khususnya pelaku bisnis agar saat MEA 2015 dilaksanakan mereka sudah siap untuk berkompetisi dengan pelaku bisnis dari negara lain.

2.4. Peluang bagi Mobilitas Tenaga Kerja Terampil

ILO (*International Labor Organization*) memprediksi bahwa MEA 2015 dapat meingkatkan kesejahteraan 600 juta masyarakat ASEAN. Rincian ILO mengenai hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Permintaan tenaga kerja profesional naik sebesar 41% atau sekitar 14 juta
2. Permintaan tenaga kerja kelas menengah naik sekitar 22% atau sekitar 38 juta
3. Permintaan tenaga kerja kelas bawah naik sekitar 24% atau sekitar 12 juta.

Menghadapi MEA 2015, Indonesia masih harus meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Data sensus penduduk menunjukkan bahwa, pendidikan tertinggi sekitar 64% dari pekerja Indonesia adalah SMP, SD, dan tidak tamat SD.

Kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang dimiliki Tenaga Kerja Indonesia juga belum merata

2.5. Peluang bagi Mobilitas Modal

Saat MEA 2015 berlangsung nanti, arus modal di Indonesia akan menjadi lebih bebas sehingga akan mendukung efisiensi transaksi keuangan untuk pembiayaan pembangunan, perdagangan internasional, pengembangan sektor keuangan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, arus modal yang lebih bebas ini mempunyai sisi negatif, diantaranya :

1. Dapat mengakibatkan pembalikan arus modal yang tiba-tiba
2. Meningkatnya permintaan domestik
3. Tekanan inflasi
4. Konsentrasi aliran modal ke negara tertentu yang memberikan keuntungan lebih
5. Meningkatnya penyelewengan pajak.

Pembalikan arus modal yang tiba-tiba dan peningkatan permintaan domestik merupakan wujud ketidakstabilan ekonomi yang kemungkinan besar dapat terjadi saat MEA 2015 berlangsung, pada akhirnya ketidakstabilan ini akan memicu inflasi yang tinggi, sebagaimana yang kita tahu diantara anggota ASEAN, Indonesia memiliki laju inflasi yang paling tinggi.

Selain itu, dengan makin bebasnya arus modal saat MEA 2015, kemungkinan akan terjadi konsentrasi modal di negara tertentu, karena tidak bisa kita pungkiri akan ada pihak-pihak tertentu dari masing-masing negara yang memanfaatkan kondisi pasar bebas ini untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi ini akan sangat menghancurkan ekonomi Indonesia apabila seandainya pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak mempunyai landasan hukum dan strategi guna membentengi kondisi yang disebutkan diatas.

Tindakan Penyalahgunaan pajak akan makin sering terjadi saat MEA 2015 nanti, karena arus modal makin bebas dan aturan-aturan makin di permudah. Yang menjadi kekhawatiran banyak kalangan adalah apakah instansi pemerintah khususnya dalam hal ini Dirjen Pajak mampu mendeteksi semua pajak yang masuk dan keluar saat MEA 2015 berlangsung?, hal ini perlu dievaluasi oleh pemerintah agar nanti saat MEA berlangsung, dampak-dampak negatif dalam sektor permodalan dapat diminimalisir sehingga menguntungkan sektor keuangan dalam negeri, para pelaku industri dan pemerintah.

Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya sedang berusaha membuat strategi di sektor keuangan guna mengatasi dampak negatif dari MEA 2105 sendiri, diantaranya membuat integrasi sektor jasa keuangan. *The Boston Consulting Group* (BCG) menganalisa ada beberapa hambatan dalam melaksanakan integrasi sistem keuangan tersebut diantaranya heterogenitas kerangka regulasi tiap negara seperti contoh ketika Bank Mandiri akan melakukan ekspansi di Malaysia yang terhambat oleh persyaratan modal yang nilainya 10 kali lebih besar daripada standar Indonesia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada BCG memberikan beberapa solusi diantaranya dengan membuat model Aliansi ASEAN, membangun infrastruktur biro kredit bersama, membentuk lembaga pemeringkat utang bersama, membebaskan aliaran data/*off-shoring*, serta menstandarisasi tata nama, dokumentasi, dan infrastruktur bersama (dikutip dari [www. Bisnis.com](http://www.Bisnis.com))

III. PEMBAHASAN UPAYA MEMPERKUAT DAYA SAING BISNIS DAN EKONOMI DALAM MENGHADAPI MEA 2015

3.1 Peningkatan daya saing Barang

Semua sektor industri memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan volume ekspor. Akan tetapi, harus dilakukan inovasi dari potensi itu bisa dijadikan suatu barang. Barang itu harus mempunyai nilai tambah, bukan hanya sekedar barang

mentah. Kementerian Perdagangan saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatan dari sektor industri manufaktur dalam rangka mengubah komposisi pendapatan menjadi non-migas 35% dan manufaktur 65%. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian saat ini sedang mengupayakan Indonesia terus menjadi basis produksi bagi perusahaan otomotif, dengan memanfaatkan pasar domestik. Insentif lainnya, pembangunan Infrastruktur, pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW), jalan, dan pelabuhan.

Peningkatan daya saing ekonomi dan bisnis juga terlihat dari volume ekspor suatu negara. Semakin tinggi volume eksportnya, negara lain akan melihat negara kita sebagai negara yang aktif dan produktif dalam menghadapi MEA 2015. Berikut ini adalah pernyataan dari Menteri Perdagangan yang dikutip dari Tabloid Kontan No. 15-XIX Edisi 5-11 Januari 2015:

1. Kementerian Perdagangan akan melakukan rapat kerja dengan mengundang menteri koordinator perekonomian dan menteri perindustrian, seluruh atase perdagangan Kedutaan Besar Indonesia termasuk dengan dinas perdagangan dari semua daerah mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota. Rapat ini bertujuan untuk membuat perencanaan ekspor nasional di 2015.
2. Permasalahan yang dihadapi perdagangan internasional akan disampaikan oleh para atase perdagangan kemudian akan dimotivasi untuk bisa melihat potensi pasar lalu membuka pasar di masing-masing negara tempatnya bertugas.
3. Atase perdagangan dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) yang berada di luar negeri harus membantu pengusaha mendapatkan pasar ekspor dengan menjadi *sales* bagi produk-produk Indonesia. Lalu, melakukan promosi perdagangan yang tepat di negara-negara yang membutuhkan produk Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.
4. Membentuk Koalisi Promosi Nasional untuk menyatukan visi-misi promosi yang selama ini terpecah di berbagai lembaga. Tujuannya adalah sebagai forum koordinasi antar kementerian terkait dengan upaya menciptakan produk Indonesia yang unggul di pasar global.

5. Menyusun formulasi langkah strategis yang berasal dari masukan pelaku bisnis di Indonesia.
6. Untuk memenuhi berbagai insentif yang diminta para pelaku bisnis, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian guna menyusun daftar insentif yang bisa diberikan dan kemudian mendiskusikannya dengan menteri keuangan.

Kementerian perdagangan harus mengoptimalkan kebijakan anti-*dumping*, anti-subsidi, pengamanan perdagangan (*safeguard*), tata niaga, kebijakan bea masuk sebagai upaya untuk menjaga agar produk impor tidak mengganggu pasar produk lokal. Untuk menjaga ketersediaan barang, kestabilan inflasi, dan harga tetap dapat dijangkau masyarakat, harus dilakukan pemantauan keseimbangan antara *demand* dan *supply*. Metode yang digunakan untuk pemantauan tersebut adalah sistem *monitoring* harga barang harian dan program intervensi tertentu.

Barang impor yang membuat para pengusaha UMKM resah, dapat diatasi dengan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Untuk meningkatkan daya saing produk, desain yang kreatif dalam pengemasan produk dapat menjadi solusi. Desain yang menarik ditambah dengan produk yang berkualitas akan membuat konsumen berfikir ulang sebelum memutuskan membeli produk impor.

Berikut ini adalah strategi untuk memberi nilai tambah berupa desain yang unik dalam pengemasan produk UMKM, yang diusulkan oleh Menteri Perdagangan yang dikutip dari Tabloid Kontan No. 15-XIX Edisi 5-11 Januari 2015:

1. membentuk pusat desain sebagai pusat kajian strategis dari desain dalam mendukung industri, jasa, dan misi pencitraan negara.
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas desainer melalui peningkatan kualitas pendidikan desain, memperbanyak sekolah desain, dan pemantapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.

3. Serta, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk yang dihasilkan, agar bisa terus mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi produk.

Mengenai perlindungan konsumen terhadap risiko pembelian produk impor, pemerintah harus melakukan penertiban dengan melakukan operasi pasar. Produk impor tersebut akan ditarik hak edarnya jika tidak menggunakan label SNI (Standar Nasional Indonesia) dan manual penggunaannya tidak berbahasa Indonesia.

3.2. Peningkatan daya saing Jasa

Agar dapat mengukur kemampuan Indonesia dalam menghadapi MEA di bidang jasa, ada baiknya dilakukan pengukuran liberalisasi jasa. Pengukuran liberalisasi jasa sudah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pasar bebas. Metode yang digunakan adalah metode konversi data kualitatif yang berasal dari berbagai peraturan yang berlaku di sektor jasa.

Fokus dalam pengukuran tersebut adalah pemberian peringkat atas faktor hambatan pada Sektor Jasa. Semakin tinggi nilai peringkatnya, berarti semakin besar hambatan yang akan dihadapi sektor jasa pada faktor tertentu. Studi ini pernah dilakukan oleh Ochiai, Ryo (2006) yang membuat indeks atas faktor-faktor yang menjadi hambatan perdagangan jasa penerbangan penumpang bilateral.

3.3. Peningkatan daya saing Investasi

Sejak awal era 80, FDI (*Foreign Direct Investment*) atau PMA (Penanaman Modal Asing) telah dilakukan oleh ASEAN. PMA sempat tersendat karena krisis ekonomi 1998 karena daya tarik negara-negara yang mengalami krisis menurun. Untuk mengatasi presentasi FDI yang lebih banyak dilakukan oleh negara non-ASEAN, Indonesia hendaknya memberikan insentif

yang menarik bagi sesama negara ASEAN agar tingkat ketergantungan antar negara ASEAN bertambah.

Nilai angka ketergantungan antar negara ASEAN yang akan memperkuat kerja sama ekonomi antar negara ASEAN dan pada akhirnya meningkatkan presentasi FDI di masing-masing negara. Sampai 2007, Kebijakan investasi yang dijalankan oleh Indonesia adalah 40 sampai dengan 95% untuk kepemilikan asing ,akan tetapi Investasi berupa kepemilikan Indonesia atas perusahaan asing (FDI keluar), diberi keterangan “bebas” (Tabel ketentuan akses pasar di ASEAN, Bank Indonesia:2008).

Kepemilikan asing dengan porsi yang cukup besar tersebut, membuat beberapa sektor jasa dalam negeri dirugikan. Banyak dari perusahaan asuransi dan bank yang sedang mengupayakan untuk meminta revisi atas kebijakan tersebut karena membuat hasil pendapatan pada beberapa instansi, tidak berputar di Indonesia, melainkan di negara asing. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya saing dalam hal Investasi, sebaiknya FDI keluar lebih jelas angkanya, tidak hanya ditentukan “bebas” karena hal tersebut lebih menguntungkan pihak asing daripada Indonesia.

3.4. Peningkatan daya saing Tenaga Kerja Terampil

Pada tahun 2010 dalam program DetikNas yang diketuai Presiden, Indonesia sudah menetapkan program e-Pendidikan. Program tersebut memungkinkan pemerintah dapat mengakses segala informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Akan tetapi program ini tidak disertai dengan Pelatihan IT yang memadai bagi para praktisi pendidikan, terutama pada tingkat Sekolah Dasar.

Banyak dari kalangan guru yang juga memiliki jabatan dalam struktur organisasi sekolah, mengalami kesulitan dalam memahami cara untuk menginput data yang dimonitor pemerintah pusat. Sebagai contoh, dalam penginputan laporan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) per

triwulan sering terjadi salah input data. Hal ini dapat diantisipasi dengan adanya penataran cara penggunaan IT dalam dunia pendidikan secara berkala yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pusat.

Peningkatan keterampilan juga menjadi solusi untuk memaksimalkan potensi SDM Indonesia. Indonesia dapat mencontoh Thailand yang sudah memiliki pusat bahasa untuk mempelajari berbagai bahasa negara anggota ASEAN agar siap menghadapi MEA 2015. Selain kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan bahasa negara ASEAN, keterampilan dalam berbagai sektor industri juga dapat ditingkatkan. Tentunya perlu kerja sama dan komitmen kuat dari Kementerian yang terkait agar pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan tersebut berjalan dengan terarah dan tepat sasaran.

3.5. Peningkatan daya saing Modal

Hal positif yang akan dirasakan dengan adanya MEA adalah kemungkinan adanya aliran modal yang besar ke kas negara. Akan tetapi tetap menjadi kewajiban kita untuk menjaga agar aliran modal yang masuk dan keluar tetap dapat dikelola dengan baik. Kawai dan Takagi (2003) menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama atas pemberlakuan kontrol modal adalah sebagai instrumen untuk mengelola sistem keuangan domestik untuk mengelola sistem keuangan domestik dalam masa transisi menuju integrasi pasar keuangan global.

Agar ketentuan tersebut dapat berjalan dengan efektif, kebijakan dalam implementasi arus modal harus memperhatikan sistem manajemen makroekonomi dan ketersediaan infrastruktur. Contoh untuk kebijakan aliran modal masuk adalah dengan menyimpan sebagian dana yang masuk pada Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

MEA adalah pekerjaan rumah yang sangat penting bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama antar beberapa kementerian, seperti kementerian perdagangan dan kementerian keuangan dalam hal insentif produksi. Pemerintah harus kompak dalam menyusun strategi guna menghadapi MEA 2015 ini. Selain itu pula, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang harmonis antara pemerintah dan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat Indonesia dalam menciptakan strategi ketahanan produk dan jasa dalam negeri, membangun sumber daya manusia yang kompeten, dan membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung lalu lintas perdagangan.

4.2. Saran

Dalam hal peningkatan daya saing barang, Indonesia bisa melakukan peningkatan volume perdagangan dengan cara dan strategi yang telah dirumuskan oleh Kementerian Perdagangan. Untuk mengatasi banyaknya barang impor yang masuk, dapat diatasi dengan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh UMKM lokal. Untuk meningkatkan daya saing produk, desain yang kreatif dalam pengemasan produk dapat menjadi solusi. Desain yang menarik ditambah dengan produk yang berkualitas akan membuat konsumen berfikir ulang sebelum memutuskan membeli produk impor.

Untuk mendorong laju investasi, Indonesia bisa mencontoh Singapura. Berikan insentif pajak dan non pajak untuk badan usaha yang beroperasi di Indonesia sehingga investor tertarik untuk berinvestasi. Investasi juga dapat dilakukan dalam bidang riset dan pengembangan yang manfaatnya akan dirasa beberapa tahun ke depan. Perbaikan kebijakan dalam hal kepemilikan asing di Indonesia juga harus dilakukan agar lebih menguntungkan bagi Indonesia.

Dari segi peningkatan daya saing tenaga kerja terampil, Indonesia dapat melanjutkan program pelatihan dan penataran yang diperlukan praktisi pendidikan dan tenaga kerja potensial juga membuat program pelatihan keterampilan baru yang memiliki relevansi dengan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan MEA 2015. Terakhir, dari segi peningkatan daya saing modal, Indonesia dapat menerapkan manajemen arus modal masuk dan arus modal keluar dengan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bank Indonesia. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 “Memperkuat Sinergi ASEAN di tengah kompetisi global”. Jakarta: PT. Elex Gramedia Komputindo

Artikel Koran

Kuncoro, Mudradjad. 2007. “Indonesia: Pemain atau Penonton AEC?”. *Seputar-Indonesia*, 26 November 2007

Hadian, Amal Ihsan. 2015. “MENYAMBUT MEA 2015: Dari Insentif Pajak sampai Belajar Bahasa Inggris-Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah siap menyambut MEA”. *Tabloid Kontan*, 5-11 Januari 2015

Siringoringo, Lamgiat. 2015. “Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan: Indonesia Harus Agresif Menyerang Pasar ASEAN”. *Tabloid Kontan*, 5-11 Januari 2015

Artikel Internet

- Adila, Raisa. "Penyelewengan Pajak Lebih Terbuka Saat Pasar Bebas 2015?". 09 November 2014. <http://economy.okezone.com/read/2014/11/09/320/1063022/penyelewengan-pajak-lebih-terbuka-saat-pasar-bebas-2015>
- Sujono, T Hardi. "Peluang dan Hambatan Indonesia dalam AEC 2015". 15 November 2013. <http://citizen6.liputan6.com/read/747106/peluang-dan-hambatan-indonesia-dalam-aec-2015>
- Triyudha, Angga. "AFTA, Peluang dan Tantangan Sekaligus Ancaman Bagi Indonesia pada 2015". 02 Oktober 2013. <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-strategis/afta-peluang-dan-tantangan-sekaligus-ancaman-bagi-indonesia-pada-2015.html>
- "Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean". 27 Agustus 2014. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec.html.
- "MEA 2015, Peluang Sekaligus Tantangan". <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9599/MEA-2015,-Peluang-Sekaligus-Tantangan>.
- "Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015". <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015>
- "Sektor Jasa juga Diatur dalam UU Perdagangan". 13 Februari 2014. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fc80c5beb6f/sector-jasa-juga-diatur-dalam-uu-perdagangan>
- "Tantangan dan Peluang UKM jelang MEA 2015". 1 Januari 2014. <http://swa.co.id/business-strategy/tantangan-dan-peluang-ukm-jelang-mea-2015>